**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

# FENOMENA POST – TRUTH DALAM ARUS GLOBALISASI INFORMASI: PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL ATAS KONDISI INDONESIA MASA KINI

**Ushwatul Jannah[1], Fleycia Tandria[2], Fadilah Yasmin Nur Ummi Siddik[3]**
[123] Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi Sosial dan Politik, Universitas Abdurrab

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Januari 2026
Revised Januari 2026
Accepted Februari 2026
Available Februari 2026

emailpenulis
semuaditulis@gmail.com

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**A B S T R A K**

Fenomena *post-truth* dalam arus globalisasi informasi menunjukkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat memahami dan memproduksi kebenaran di era digital, yang turut memengaruhi dinamika hubungan internasional dan kondisi politik domestik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena *post-truth* memengaruhi konstruksi persepsi publik, efektivitas *soft power*, serta posisi Indonesia dalam lanskap informasi global. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, dan kajian terkait globalisasi informasi, disinformasi digital, serta hubungan internasional. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola disinformasi, polarisasi sosial, serta implikasinya terhadap legitimasi negara dan diplomasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan algoritma digital mendorong terbentuknya *echo chamber*, memperkuat narasi emosional, serta meningkatkan penyebaran disinformasi yang berdampak pada krisis kepercayaan publik dan polarisasi politik di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kualitas demokrasi domestik, tetapi juga citra dan kredibilitas Indonesia dalam interaksi internasional. Dalam perspektif konstruktivis, pertarungan narasi menjadi bentuk baru kompetisi global yang berkaitan dengan keamanan informasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, tata kelola informasi global, serta strategi berbasis *soft power* melalui diplomasi digital dan kolaborasi multipihak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan informasi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial dan posisi Indonesia di era globalisasi informasi.

**Kata Kunci**: ***Post – Truth*; *Globalisasi Informasi*; *Diplomasi Digital*; *Keamanan Non Tradisional*; *Soft Powe*, *Literasi Digital***

***A B S T R A C T***

*The post-truth phenomenon in the flow of information globalization shows a fundamental change in the way society understands and produces truth in the digital age, which also affects the dynamics of international relations and Indonesia's domestic political conditions. This study aims to analyze how the post-truth phenomenon affects the construction of public perception, the effectiveness of soft power, and Indonesia's position in the global information landscape. The research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach, through data collection from various scientific journals, academic books, and studies related to information globalization, digital disinformation, and international relations. Data analysis is carried out*

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id

*through the stages of data reduction, thematic presentation, and conclusion drawing to identify patterns of disinformation, social polarization, and their implications for state legitimacy and contemporary diplomacy. Research shows that the development of social media and digital algorithms encourages the formation of echo chambers, reinforces emotional narratives, and increases the spread of disinformation, which has an impact on the crisis of public trust and political polarization in Indonesia. This phenomenon not only affects the quality of domestic democracy, but also Indonesia's image and credibility in international interactions. From a constructivist perspective, the battle of narratives has become a new form of global competition related to information security. Therefore, strengthening digital literacy, global information governance, and soft power-based strategies through digital diplomacy and multi-stakeholder collaboration are strategic steps to improve national information security while maintaining social stability and Indonesia's position in the era of information globalization.*

***Keywords**: Post – Truth, Information Globalization, Digital Diplomacy, Non – Traditional Security, Soft Power, Digital Literacy*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, pasca berlangsungnya globalisasi memiliki efek yang semakin beragam pada penyampaian informasi melalui media komunikasi. Dunia maya (cyberspace) telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia (politik, sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual) yang terjadi pada realitas sosial ke dalam bentuk substitusi artifisialnya, sehingga bentuk kegiatan yang terjadi di dunia nyata, dapat pula terjadi pada dunia artifisialnya (dalam *cyberspace*). Berdasarkan realitas kemajuan pada perkembangan teknologi yang begitu masif hingga saat ini, maka bentuk dari permasalahan yang muncul dari masyarakat tidak hanya berdasarkan bagaimana masyarakat memperoleh berita melainkan terhadap kurangnya kemampuan dari masyarakat untuk mencerna informasi yang benar. Kesenjangan antara kurangnya literasi media di tengah banjirnya informasi ini disalahgunakan oleh sebagaian kelompok untuk memproduksi berita yang tidak terkonfirmasi, yang belum tentu kebenarannya atau sering disebut hoaks. Media sosial menjadi medium penting penyebaran *hoaks* (Figuiera & Oliveira, 2017).

Fenomena pasca-kebenaran (*post-truth*) kini hadir di tengah ledakan informasi yang bagitu masif. Masyarakat tidak hanya menghadapi tantangan globalisasi, tetapi juga serangan "infodemik" di era digitalisasi ini. Akibatnya, semakin sulit membedakan antara fakta dan rumor, yang sering kali berujung pada kepanikan serta kebingungan massal. Arus data yang tidak terbatas justru kerap menenggelamkan logika dan kemampuan berpikir kritis. Keberadaan fenomena ini mengancam tatanan teori kebenaran yang telah berkembang (Mutawally, Zakaria, & Hazbini, 2023). Masyarakat dibuat bimbang secara terus menerus, dan pada akhirnya kebanyakan individu mengalami kelumpuhan analisis yang dapat berujung pada kegagalan dalam mengambil keputusan yang rasional. Emosi sering kali lebih mendominasi daripada logika, sehingga membuat masyarakat tidak lagi ingin mencari tahu kebenaran, melainkan sebaliknya yang lebih mengedepankan "pembenaran ". Ibarat mencari jarum di tengah belantara informasi, kebenaran pun terpinggirkan oleh banyaknya opini-opini publik yang menumpuk. Di era *post-truth,* kebenaran memang tidak lagi menjadi fokus utama yang dicari dalam setiap proses pertukaran informasi (Purba & Sitorus, 2023)

Dalam konteks hubungan internasional, arus informasi global tidak hanya memengaruhi persepsi domestik, tetapi juga citra dan posisi suatu negara di mata dunia. Konsep kekuatan lunak (*soft power*) yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr. menekankan bahwa kemampuan suatu negara untuk memengaruhi pihak lain tidak lagi semata-mata melalui kekuatan militer atau ekonomi, melainkan melalui daya tarik nilai, budaya, dan narasi (Nye, 2004). Namun, dalam era *post-truth*, dominasi narasi sering kali dibangun atas dasar emosi dan keyakinan subjektif dibandingkan fakta objektif, sehingga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan stabilitas politik. Di Indonesia masa kini, kondisi ini tercermin dalam maraknya disinformasi, polarisasi sosial, serta kontestasi wacana di ruang digital yang tidak jarang berdampak pada hubungan diplomatik maupun persepsi global terhadap negara.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

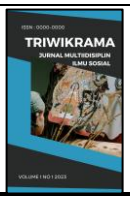


Era globalisasi informasi melahirkan kondisi di mana aktor negara maupun non-negara dapat memproduksi dan mendistribusikan narasi secara transnasional, sehingga batas antara politik domestik dan internasional semakin kabur. Dalam situasi *post-truth*, kekuatan narasi yang bersifat manipulatif dapat memengaruhi persepsi publik, preferensi kebijakan, bahkan stabilitas kawasan. Nye menegaskan bahwa dalam era informasi, pihak yang mampu mengendalikan arus informasi dan membentuk preferensi akan memiliki keunggulan dalam politik global (Nye, 2004). Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu **bagaimana fenomena *post-truth* memengaruhi efektivitas *soft power* Indonesia dalam arus globalisasi informasi, dan bagaimana implikasinya terhadap kredibilitas serta strategi diplomasi Indonesia di tingkat regional maupun global?**

## TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena *post-truth* berkembang seiring dengan percepatan globalisasi informasi dan transformasi teknologi digital yang mengubah cara masyarakat memahami kebenaran. Artikel **"Truth, Post Truth, dan Dinamikanya di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur" (2023)** menjelaskan bahwa kriteria kebenaran yang sebelumnya merujuk pada kesesuaian fakta mengalami pergeseran menjadi berbasis viralitas dan resonansi emosional di media sosial serta membahas terkait penekanan pada pentingnya fungsi media sebagai *gatekeeper* untuk mengimbangi derasnya arus disinformasi melalui verifikasi fakta dan penguatan etika (Purba dan Sitorus, 2023). Sementara itu, dalam **"Pengaruh Hoaks Politik dalam Era *Post-Truth* terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional" (2019), d**itegaskan bahwa derasnya arus informasi digital di Indonesia memicu meningkatnya penyebaran hoaks politik yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional dan kohesi sosial (Amilin, 2019). Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa fenomena *post-truth* tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi komunikasi yang mempercepat sirkulasi informasi tanpa diimbangi dengan kapasitas literasi kritis masyarakat.

Dalam perspektif hubungan internasional, transformasi ini turut mengubah pola interaksi antarnegara melalui digitalisasi komunikasi global. Artikel **"Media Sosial dalam Hubungan Internasional (2019)** menyoroti bagaimana media sosial mendorong lahirnya aktor-aktor baru—baik negara maupun non-negara—yang aktif membentuk opini publik global secara *real time* (Subagyo, 2019). Perubahan ini berkaitan erat dengan dinamika diplomasi publik yang dibahas dalam **"Fenomena Diplomasi Publik di Era Post-Truth: Dari Kesepahaman Bersama Menuju Manipulasi Pesan Propaganda" (2025)**, yang menegaskan bahwa diplomasi publik di era *post-truth* tidak lagi semata-mata berbasis dialog dan pertukaran nilai, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen konstruksi narasi, manipulasi makna, dan legitimasi kepentingan politik (Baskoro, et al., 2025). Dengan demikian, fenomena *post-truth* berimplikasi langsung terhadap praktik diplomasi dan kontestasi wacana dalam sistem internasional.

Lebih lanjut, dimensi sosial-budaya dari fenomena ini juga dibahas dalam artikel **"Masyarakat, Indonesia dan Tantangan Sejarah Di Era Post-Truth" (2023)** yang menunjukkan bahwa era revolusi industri 4.0 melahirkan *post-truth society*, yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan keyakinan subjektif dibandingkan verifikasi ilmiah (Mutawally, et al., 2023). Secara keseluruhan, kajian terdahulu sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena *post-truth* di Indonesia merupakan hasil interaksi antara globalisasi informasi, transformasi teknologi komunikasi, serta dinamika politik global, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner dalam kajian hubungan internasional untuk memahami implikasinya terhadap legitimasi negara, stabilitas domestik, dan citra Indonesia di tingkat internasional.

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

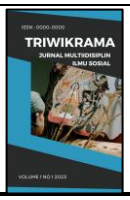


Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *post-truth* dari beragam sudut pandang, sebagian besar masih menempatkannya dalam kerangka komunikasi, literasi media, maupun dinamika sosial domestik. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian/tulisan yang secara komprehensif mengintegrasikan fenomena *post-truth*, arus globalisasi informasi, serta analisis perspektif hubungan internasional untuk menjelaskan posisi dan kondisi Indonesia masa kini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan fenomena *post-truth* sebagai isu strategis hubungan internasional yang tidak hanya berdampak pada ruang domestik, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan citra negara, kontestasi narasi global, dan interaksi Indonesia dalam lingkungan internasional berbasis informasi.

## 1. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika produksi dan reproduksi narasi dalam ruang digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif menekankan pada pemaknaan, interpretasi, serta pemahaman konteks sosial di balik suatu fenomena, bukan sekadar pengukuran kuantitatif (Creswell, 2016). Dalam konteks *post-truth*, bias informasi dan dominasi emosi publik tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan interaksi simbolik yang terjadi di media digital. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana arus globalisasi informasi membentuk persepsi masyarakat Indonesia, sekaligus memengaruhi citra dan posisi Indonesia dalam lanskap hubungan internasional. Sumber data diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan *post truth,* globalisasi informasi dan *soft power*.

Sementara itu, teknik analisis data yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong (Moleong, 2018). Proses reduksi data difokuskan pada penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait bentuk bias informasi, pola disinformasi, serta respons publik yang mencerminkan karakteristik *post-truth*. Selanjutnya, data disajikan secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara dinamika domestik dan implikasinya dalam perspektif hubungan internasional. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam mengenai bagaimana fenomena *post-truth* dalam arus globalisasi informasi memengaruhi konstruksi persepsi, legitimasi, dan strategi naratif Indonesia di tingkat global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tansformasi Globalisasi Informasi dan Lahirnya Era *Post – Truth* di Indonesia

Di era revolusi digital 4.0, isolasi informasi yang diciptakan oleh algoritma di media sosial bekerja seperti cermin yang hanya memantulkan apa yang kita sukai, melalui beberapa aplikasi media sosial seperti Tiktok, Facebook, Instagram, dan X (Twitter) dengan sistem yang sama, yaitu cenderung menyajikan konten dari preferensi atau bias pengguna, sehingga pendapat pribadi seolah olah menjadi kebenaran mutlak karena divalidasi oleh konten serupa yang muncul terus menerus. Hal ini mengakibatkan hilangnya multiperspektivitas, dan pengguna media sosial akhirnya terisolasi dalam kebenaran subjektif mereka sendiri tanpa memverifikasi fakta (Su, 2022). Secara sosiologis, individu cenderung melakukan resistensi informasi yang dapat memperkuat bias informasi, sensasionalisme seperti kemarahan dan ketakutan cenderung mendapatkan retensi audiens yang tinggi, meskipun akurasinya rendah.

Hal ini juga dipicu oleh polarisasi politik sebagai salah satu katalisator utama fenomena *post-truth*. Kebenaran verifikatif yang terpinggirkan oleh sentimen subjektif akibat dukungan fanatik

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

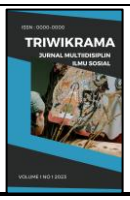


terhadap kelompok politik tertentu. Dalam struktur sosial yang terpolarisasi, upaya rekonsiliasi berbasis data menjadi sulit karena bias informasi kolektif terus diproduksi. Posisi ini justru memperkuat sikap politik kelompok tertentu dalam menghadapi pemilu mendatang (Yusran & Sapar, 2022). Mundurnya rasionalitas di tengah polarisasi adalah hasil dari cerminan kecenderungan masyarakat yang haus validasi identitas untuk lebih memprioritaskan penyebaran disinformasi dibandingkan melakukan komparasi data (Purba & Sitorus, 2023).

Selain itu, kemampuan literasi sangat berpengaruh terhadap integrasi intelektualitas dan kritisme masyarakat saat ini. Rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor kuat dalam fenomena pasca-kebenaran. Banyak orang tidak memikirkan dampak daripada penyebaran misinformasi yang berlebihan tanpa adanya kewaspadaan epistemik, secara tidak sengaja tentu masyarakat menjadi agen penyebar hoaks karena menganggap narasi-narasi publik sebagai informasi yang bermanfaat untuk diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir dampak daripada fenomena *post-truth* dikalangan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kebijakan penggunaan media sosial sehingga masyarakat tidak terjebak oleh ledakan berita yang menyebabkan misinformasi. Masyarakat tidak gampang termakan oleh hoaks dan dapat menyaring informasi terlebih dahulu, menganalisis dari berbagai sumber yang ada. Tidak semata-mata mempercayai begitu saja yang dapat menyebabkan peristiwa krusial seperti demo yang harusnya dilaksanakan secara kondusif berubah menjadi kisruh, hingga menyebabkan krisis kepercayaan terhadap fakta objektif dan termakan narasi yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu.

Saat ini, krisis legitimasi sedang melanda berbagai lembaga negara, otoritas hukum, serta media arus utama. Hal ini merupakan akumulasi dari berbagai skandal korupsi, manajemen krisis kesehatan yang tertutup, serta kuatnya intervensi politik dalam birokrasi mnjelang pemilu (Salsabila, et al., 2025). Degradasi kepercayaan masyarakat ini secara langsung memperlemah otoritas lembaga dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Kondisi defisit kepercayaan tersebut kian tereskalasi oleh persebaran disinformasi digital yang memanfaatkan sentimen ketidakpuasan sosial-ekonomi di masyarakat. Ketika kepercayaan ini hancur, maka kohesi sosial juga ikut melemah. Di masyarakat yang dilanda krisis kepercayaan, kecenderungan untuk menyebar ujaran kebencian, intoleransi, dan penolakan terhadap publik menjadi semakin tinggi (Purba & Sitorus, 2023).

### *Post – Truth* sebagai Fenomena dalam Dinamika Hubungan Internasional Kontemporer

Fenomena *post – truth* merujuk pada situasi dan kondisi dimana kebenaran secara objektif menjadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk suatu opini publik, jika dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Era *post – truth* ini ditandai dengan melemahnya kebenaran factual dan meningkatnya dominasi informasi yang berasal dari keyakinan dan emosi yang tidak memiliki data yang akurat dan data yang benar (Keyes, 2004). Perkembangan *post – truth* dimulai dari pengenalan yang dilakukan oleh Steve Tesich pada tahun 1992 dalam refleksinya yang berkaitan dengan kasus Perang Teluk dan Iran yang kemudian berkembang pesat dalam konteks politik modern, terutama melalui pemberitaan di media sosial. (Suharyanto, 2019).

*Post – truth* memiliki dampak global yang cukup signifikan dengan merusak demokrasi, terutama melalui penyebaran disinformasi yang menganggu stabilitas politik dan memperburuk polarisasi sosial. Disinformasi atau penyebaran berita hoaks kerap digunakan sebagai alat untuk memperkuat narasi politik tertentu, yang tidak jarang ditemukan akan bersifat populis dan mengabaikan rangkaian fakta yang sebenarnya terjadi. Pada negara – negara yang sedang mengalami perkembangan demokrasi pada tahap berkembang, seperti Indonesia, disinformasi

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

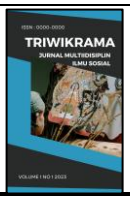


sering digunakan untuk menggerakkan ketakutan terhadap masyarakat pada minoritas atau lawan politik, yang pada gilirannya mencipatakan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses politik yang seharusnya inklusif dan terdapat transparasi informasi yang disebarkan (Rubaidi, 2020).

Fenomena *post-truth* turut memengaruhi dinamika mobilitas global, khususnya dalam isu migrasi dan hubungan internasional. Penyebaran disinformasi mengenai imigran, kebijakan luar negeri, serta identitas etnis kerap dimanfaatkan oleh kelompok politik populis untuk membangun narasi ketakutan dan sentimen xenofobia. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk relasi antarnegara sekaligus mengganggu stabilitas kawasan (Inglehart & Norris, 2016). Dalam konteks Uni Eropa, misalnya, disinformasi terkait imigran dan pengungsi berkontribusi signifikan dalam proses referendum Brexit. Isu mengenai pengendalian perbatasan dan kedaulatan nasional dimobilisasi secara strategis guna memperoleh dukungan politik terhadap keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Mudde, 2016).

Di Amerika Serikat, penyebaran disinformasi terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya polarisasi politik dan sosial, khususnya pada pemilihan presiden tahun 2016. Narasi *post-truth* dimanfaatkan secara strategis dengan menekankan aspek emosional dan rasa takut publik dibandingkan penyampaian fakta objektif, sehingga efektif dalam membangun dukungan politik (Koerniadi, 2019). Dampaknya tidak hanya memperdalam fragmentasi sosial di tingkat domestik, tetapi juga memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama periode tersebut. Sejumlah kebijakan yang dihasilkan memicu ketegangan diplomatik, terutama dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang kerap diposisikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (Keyes, 2004).

Di kawasan Asia, khususnya Indonesia, fenomena *post-truth* juga tampak nyata dalam berbagai kontestasi politik lokal maupun nasional. Disinformasi yang tersebar melalui media sosial sering kali dikonstruksi menggunakan isu agama dan etnis, sehingga memperkuat sentimen identitas dan memicu konflik antarkelompok masyarakat. Peristiwa yang berkaitan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi ilustrasi penting mengenai bagaimana disinformasi dimanfaatkan untuk membangun polarisasi berbasis identitas keagamaan (Suharyanto, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *post-truth* tidak hanya berpotensi melemahkan kualitas demokrasi, tetapi juga mengancam kohesi sosial dengan memperlebar jarak sosial dan politik di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda (Rubaidi, 2020).

Selanjutnya, fenomena *post-truth* dalam dinamika hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa kompetisi politik global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan material, diplomasi formal, maupun rasionalitas kebijakan, tetapi juga oleh pertarungan narasi, persepsi publik, dan produksi informasi di ruang digital. Disinformasi yang melintasi batas negara telah mengubah cara aktor negara maupun non-negara memengaruhi opini publik, membentuk identitas kolektif, serta menentukan arah kebijakan domestik dan internasional. Oleh karena itu, memahami *post-truth* menjadi penting dalam kajian hubungan internasional modern, karena fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi dan stabilitas sosial, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keamanan global, kerja sama antarnegara, dan tata kelola internasional di era informasi.

## Praktik *Post – Truth* dalam Konteks Politik Indonesia Masa Kini

Dinamika perkembangan *post-truth* dalam ranah politik di Indonesia mulai tampak secara nyata pada pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2019. Pada periode tersebut, dinamika politik identitas serta maraknya ujaran kebencian turut mewarnai arus informasi yang tersebar luas melalui berbagai platform media sosial. Realitas *post-truth* dalam politik, khususnya yang

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

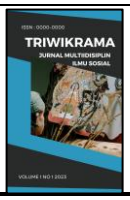


berkaitan dengan politisasi agama, mendorong terbentuknya penilaian yang bersifat subjektif dan dilekatkan pada kepentingan politik tertentu, disertai dengan berkembangnya wacana populisme serta penyebaran informasi yang mengalami distorsi, terutama di ruang digital (Kurniawan, 2018).

Lebih jauh, fenomena *post-truth* di Indonesia yang beririsan dengan isu keagamaan bahkan telah menyentuh aspek ideologi negara. Selanjutnya, perkembangan fenomena tersebut berpotensi mengganggu nilai-nilai pluralitas dan tatanan sosial yang telah terbentuk, terutama akibat penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan disinformasi dan narasi kebencian demi kepentingan politik. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas iklim demokrasi di Indonesia, karena orientasi politik cenderung bergeser pada pendekatan populis yang menitikberatkan pada daya tarik terhadap pemilih mayoritas serta kepentingan politik tertentu (Purba dan Sitorus, 2023).

Dalam konteks ideal, proses kontestasi politik di negara demokratis seharusnya menitikberatkan pada penyampaian informasi serta pertukaran gagasan yang berbasis fakta mengenai program dan visi yang ditawarkan oleh para kandidat kepada masyarakat. Akan tetapi, realitas yang terjadi di Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda. Fenomena *post-truth* semakin menguat dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, ditandai dengan munculnya wacana politik yang lebih menonjolkan retorika dibandingkan substansi. Kemunculan istilah seperti *cebong* dan *kampret* menjadi simbol polarisasi politik yang turut membentuk konstruksi persepsi publik terhadap apa yang disebut sebagai fakta alternatif (Jatmiko, 2019).

Strategi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menarik perhatian sekaligus memperoleh dukungan dari kelompok pendukung yang bersifat militan, melalui penyebaran opini subjektif dan isu-isu sensitif yang dikemas seolah-olah sebagai kebenaran, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melemahkan lawan politik dalam arena kompetisi demokratis. Praktik *post-truth* dalam politik Indonesia masa kini juga semakin diperkuat oleh perkembangan ekosistem digital yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi publik, tetapi juga menjadi arena produksi dan reproduksi narasi politik yang sarat kepentingan. Algoritma platform digital cenderung memperkuat preferensi pengguna melalui *echo chamber yaitu* kondisi ketika seseorang hanya menerima dan mempercayai informasi yang sesuai dengan pendapatnya sendiri karena terus berada dalam lingkungan atau media yang menampilkan pandangan yang sama, sehingga masyarakat lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya. Kondisi ini menyebabkan batas antara fakta, opini, dan disinformasi menjadi semakin kabur, serta mendorong terbentuknya polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.

Selain itu, praktik *post-truth* turut memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat yang semakin emosional dibandingkan rasional. Orientasi pemilih tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada evaluasi program, rekam jejak, maupun kapasitas kandidat, melainkan pada kedekatan identitas, sentimen kelompok, dan narasi yang mampu membangkitkan respons afektif. Situasi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas diskursus publik karena ruang demokrasi lebih didominasi oleh persaingan persepsi daripada pertukaran gagasan substantif. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka praktik demokrasi berpotensi mengalami degradasi, karena proses pengambilan keputusan politik tidak lagi bertumpu pada pertimbangan rasional dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun faktual.

## Disinformasi Politik dan Krisis Kepercayaan Publik dalam Era *Post-Truth* di Indonesia

Salah satu dampak nyata daripada pasca-kebenaran yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia adalah aksi demo atas penolakan gaji Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebabkan

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id

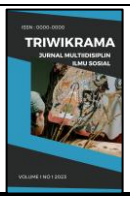


keadaan kisruh secara masif. Hal ini dipengaruhi oleh maraknya pemberitaan tentang kenaikan gaji yang dianggap meresahkan masyarakat Indonesia. Kalangan masyarakat mulaidari buruh, mahasiswa, dan para warga sipil ikut terjun ke dalam aksi demo tersebut (Nur & Farabi, 2022), sehingga mengakibatkan kesenjangan antara elit politik dan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat. Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 tersebut merupakan salah satu momentum penting dalam diskursus politik Indonesia. Peristiwa ini dipicu oleh protes keras terhadap besaran gaji yang diterima oleh DPR-RI yaitu sebanyak 50 juta rupiah untuk tunjangan perumahan (Salsabila, et al., 2025).

Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Namun, defisit kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan kian diperparah oleh arus informasi di media sosial, meskipun pimpinan parlememen telah mengupayakan langkah-langkah persuasif. Akibat persepsi ketidakadilan ekonomi, masyarakat tidak lagi mempercayai klarifikasi dari otoritas terkait, sehingga memicu situasi yang kisruh dan anarkis. Perdebatan antar individu pun meledak di seluruh media sosial, narasi tentang ketidakpedulian pemerintah lantas dikaitkan dengan dugaan agenda politik terselubung untuk menjatuhkan citra pihak terntentu (Purba & Sitorus, 2023).

Gejolak penolakan gaji anggota DPR tersebut menunjukkan bahwa disinformasi politik dalam era *post – truth* tidak hanya berdampak pada kesalahpahaman informasi, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara yang dalam hal ini adalah anggota DPR. Ketika informasi yang tidak terverifikasi menyebar lebih *rapid* dibandingkan klarifikasi resmi, masyarakat cenderung membangun persepsi berdasarkan narasi emosional yang dianggap merepresentasikan realitas sosial mereka. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana otoritas publik mengalami kesulitan untuk memulihkan legitimasi di tengah derasnya arus informasi digital. Akibatnya, ruang publik menjadi rentan terhadap mobilisasi massa yang percaya terhadap persepsi kolektif bukan percaya terhadap fakta empiris, sehingga memperkuat pola politik reaktif yang berpotensi menganggu stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia.

**Strategi Adaptasi: Literasi Informasi dan Tata Kelola Informasi Global**

Perkembangan *post-truth* dalam arus globalisasi informasi menunjukkan bahwa dinamika hubungan internasional kontemporer tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan material, melainkan juga oleh konstruksi ide, identitas, dan narasi yang berkembang dalam ruang digital global. Perspektif konstruktivis memandang realitas politik sebagai hasil interaksi sosial yang dibentuk melalui pertukaran makna dan persepsi antaraktor, baik negara maupun masyarakat. Dalam konteks Indonesia masa kini, penyebaran disinformasi dan manipulasi informasi melalui media digital memperlihatkan bagaimana kebenaran faktual sering kali dikalahkan oleh narasi emosional dan identitas kelompok, sehingga memengaruhi opini publik serta membentuk preferensi politik masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa arus informasi global telah menjadi arena kontestasi wacana yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas domestik dan citra negara di tingkat internasional.

Dalam kerangka tersebut, peran negara mengalami transformasi dari sekadar regulator komunikasi menjadi aktor strategis dalam tata kelola informasi (*information governance*). Negara dituntut mampu merespons tantangan *post-truth* melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga persuasif dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *soft power*, di mana legitimasi dan pengaruh negara dibangun melalui kepercayaan publik, transparansi informasi, serta kemampuan menciptakan narasi yang kredibel di ruang publik digital (Baskoro, et al., 2025). Upaya penguatan diplomasi digital, klarifikasi informasi publik, dan kerja sama internasional dalam menghadapi disinformasi lintas batas menjadi bagian dari strategi negara

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

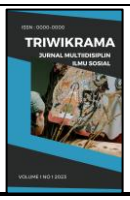


dalam mempertahankan stabilitas politik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola informasi global.

Lebih lanjut, fenomena *post-truth* memperlihatkan bahwa keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer tradisional, melainkan juga mencakup dimensi keamanan informasi. Disinformasi yang masif berpotensi memicu polarisasi sosial, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menciptakan kerentanan politik yang dapat dimanfaatkan oleh aktor domestik maupun transnasional. Oleh karena itu, literasi digital menjadi instrumen keamanan non-tradisional yang strategis, karena berfungsi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memilah, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi secara kritis. Dalam perspektif hubungan internasional, masyarakat yang memiliki ketahanan informasi yang kuat turut berkontribusi pada stabilitas negara dalam menghadapi tekanan arus globalisasi informasi.

Pada akhirnya, strategi adaptasi terhadap fenomena *post-truth* menuntut kolaborasi multipihak antara pemerintah, media, akademisi, sektor teknologi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan konstruktivis menekankan pentingnya pembentukan norma sosial baru yang menjunjung tinggi rasionalitas, verifikasi fakta, dan etika komunikasi digital sebagai nilai bersama. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *post-truth* bukan sekadar sebagai persoalan komunikasi politik, tetapi sebagai isu strategis dalam studi hubungan internasional yang berkaitan dengan perebutan pengaruh, legitimasi, dan keamanan informasi di era globalisasi. Pendekatan berbasis *soft power* dan penguatan literasi informasi menjadi kontribusi konseptual yang relevan dalam memahami kondisi Indonesia masa kini di tengah transformasi lanskap informasi global.

## 2. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Media sosial pada era kontemporer menghadirkan posisi yang ambivalen dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, platform digital memperluas ruang partisipasi publik dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menjadi medium yang mempercepat berkembangnya fenomena *post-truth*. Mekanisme algoritma yang cenderung menampilkan informasi serupa dengan preferensi pengguna menciptakan kondisi *echo chamber*, sehingga memperkuat polarisasi politik dan mengurangi keterbukaan masyarakat terhadap sudut pandang yang berbeda. Situasi ini semakin diperparah oleh tingkat literasi digital yang masih terbatas, sehingga informasi yang tidak terverifikasi mudah diterima dan disebarluaskan.

Peristiwa demonstrasi penolakan tunjangan DPR-RI pada Agustus 2025 menunjukkan bagaimana rapuhnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah arus informasi digital. Narasi yang bersifat emosional dan viral di media sosial terbukti memiliki daya mobilisasi yang lebih kuat dibandingkan penjelasan resmi berbasis data. Kondisi tersebut menandakan bahwa opini publik tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh fakta objektif, melainkan oleh persepsi kolektif yang berkembang secara cepat melalui interaksi digital.

Dengan demikian, tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini bukan semata pada ketersediaan informasi, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi dan penilaian kritis terhadap informasi yang beredar. Penguatan literasi digital, transparansi komunikasi publik, serta peningkatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak disinformasi. Upaya tersebut diperlukan agar ruang demokrasi tetap sehat dan proses pembentukan opini publik dapat kembali bertumpu pada fakta yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id

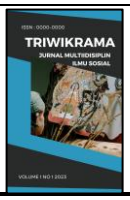


**Saran**

a) **Penguatan Tata Kelola Informasi Nasional berbasis Diplomasi Digital**
Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kebijakan tata kelola informasi digital melalui pendekatan diplomasi digital yang terintegrasi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Upaya ini mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga negara, penguatan regulasi platform digital, serta kerja sama internasional dalam menghadapi penyebaran disinformasi lintas batas sebagai bagian dari strategi keamanan informasi global.

b) **Pengembangan Literasi Digital sebagai Instrumen Keamanan Non-Tradisional**
Literasi digital perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan pendidikan dan program publik sebagai upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap fenomena *post-truth*. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam verifikasi informasi, berpikir kritis, dan memahami dinamika media digital menjadi langkah strategis untuk mencegah polarisasi sosial serta memperkuat stabilitas nasional dalam perspektif keamanan non-tradisional.

c) **Penguatan Strategi Soft Power melalui Kolaborasi Multipihak**
Negara perlu mengoptimalkan strategi *soft power* dengan melibatkan media, akademisi, komunitas sipil, dan sektor teknologi dalam membangun narasi publik yang kredibel dan berbasis fakta. Kolaborasi multipihak ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra Indonesia di ruang global, serta menjadikan pengelolaan informasi sebagai bagian dari praktik diplomasi kontemporer dalam studi hubungan internasional.

## 3. DAFTAR PUSTAKA

Amalliah. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax di Media Online Pada Era Post Truth. Jurnal AKRAB JUARA, 1-15.

Amilin, A. (2019). Pengaruh hoaks politik dalam era post-truth terhadap ketahanan nasional dan dampaknya pada kelangsungan pembangunan nasional. Jurnal Lemhannas RI, 7(3), 5-11.

Baskoro, R. M., Sarasati, F., Wahyuti, T., Paninggiran, H. N., & Santoso, P. Y. (2025). FENOMENA DIPLOMASI PUBLIK DI ERA POST-TRUTH: DARI KESEPAHAMAN BERSAMA MENUJU MANIPULASI PESAN PROPAGANDA. Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 6(2), 317-331.

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djaguna, A. A. (2023). Komunikasi Politik: Post-Truth Media Sosial Dalam Pemilu. Dalam S. Deni, A. Deni, & A. Badjodah, Demokrasi & Komunikasi Politik (hal. 150-170). Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Figueira, Á., & Oliveira, L. (2017). The current state of fake news: challenges and opportunities. Procedia computer science, 121, 817-825.

Inglehart, R., & Norris, P. (2016). Cultural Backlash and the Rise of Populism: The Post-Truth Phenomenon in Western Democracies. Cambridge University Press.

Jatmiko, M. I. (2019). Post truth, media sosial, dan misinformasi: pergolakan wacana politik pemilihan presiden indonesia tahun 2019. Jurnal Tabligh, 20(1), 21-39.

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin's Press.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

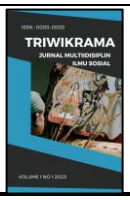


Kurniawan, D. (2018). Disinformasi dan Politik Identitas di Indonesia: Tinjauan Terhadap Media Sosial. Jurnal Politik dan Hukum, 11(2), 114-128.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mudde, C. (2016). Populist Radical Right Parties in Europe: Disinformation and Democracy in Crisis. Oxford University Press.

Mutawally, A. F., Zakaria, M. M., & Hazbini. (2023). Masyarakat Indonesia dan Tantangan Sejarah Di Era Post-Truth. KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 288-297.

Nur, Q., & Farabi, S. E. (2022). Kehadiran Media Sosial dan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula. Jurnal CommLine, 112-123.

Nye Jr, J. S. (2004). Power in the global information age: From realism to globalization. Routledge.

Purba, H., & Sitorus, F. K. (2023). Truth, Post Truth, dan Dinamikanya di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, 1-16.

Rubaidi, M. (2020). Polarisasi Politik dan Identitas Agama dalam Wacana Post-Truth: Analisis Kasus Pilgub DKI Jakarta 2017. Jurnal Politik Indonesia, 9(1), 33-50.

Salsabila, K. A., Anastasya, N., Saritza, Z., Simanjuntak, A. C., Nafis, M., Situmorang, K. R., . . . Annisas, S. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat: Krisis Kepercayaan dan Reformasi DPR Pada Era Presiden Prabowo. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 16686-16695.

Su, Y. (2022). The Study of the Influence of Social Media on Post-Truth Era. Proceedings of the 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022) (pp. 554-559). Paris: Atlantis Press.

Subagyo, A. (2019). Media Sosial dalam Hubungan Internasional. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 4(01), 3-23.

Suharyanto, B. (2019). Post-Truth dan Politisasi Agama dalam Pilkada DKI Jakarta. Jurnal Politik Islam, 12(3), 45-58.

Tosepu, Y. A. (2018). Media Baru dalam Komunikasi Politik. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Wijaya, I. B. (2020). Media Sosial dan Citizen Journalism: Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 191-200.

Yusran, I. I., & Sapar. (2022). Pengaruh Media Sosial dan Perilaku Pemilih dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024. Jurnal Darma Agung, 187-203.

*Ushwatul Jannah
E-mail addresses: ushwatul.jannah@univrab.ac.id